

**KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
(STUDI PADA PROGRAM SPAM DI KABUPATEN KOLAKA UTARA)**

***THE DEVELOPMENT COMMUNICATION IN IMPROVING PUBLIC PARTICIPATION
(STUDY ON SPAM PROGRAM IN NORTH KOLAKA DISTRICT)***

Eddy Anhar¹, Mahdar^{2*}, Ahmad Syarif Sukri³, Masdiana⁴

¹ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kolaka Utara

² Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

^{3,4} Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara

*Email Koresponden : mahdar.unusra@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran komunikasi pembangunan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Kolaka Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan lokasi di beberapa desa penerima manfaat SPAM di Kecamatan Lasusua dan dilaksanakan pada April–Mei 2025. Komunikasi pembangunan berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam menghadapi rendahnya kesadaran dan keterlibatan warga. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan aspirasinya dihargai, partisipasi mereka meningkat dalam bentuk tenaga, gagasan, dan pemeliharaan infrastruktur. Penelitian ini merekomendasikan agar Dinas PUPR Kabupaten Kolaka Utara mengedepankan pendekatan komunikasi yang sesuai dengan budaya, bahasa, dan pola interaksi masyarakat lokal dalam pengelolaan program SPAM.

Kata Kunci : Komunikasi, Komunikasi Pembangunan, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan, SPAM

Abstract

This study aims to analyze the role of development communication in increasing community participation in the Drinking Water Supply System (SPAM) program in North Kolaka Regency. The research uses a descriptive qualitative approach, conducted in several beneficiary villages in Lasusua District during April–May 2025. Development communication serves as a bridge between the government and the community, particularly in addressing low awareness and involvement among residents. When people feel included and their aspirations are valued, their participation increases through labor, ideas, and infrastructure maintenance. This study recommends that the Public Works and Spatial Planning Office (PUPR) of North Kolaka Regency apply a communication approach tailored to the local culture, language, and social interaction patterns in managing the SPAM program.

Keywords : Communication, Development Communication, Community Participation, Development, SPAM

PENDAHULUAN

Pembangunan yang dijalankan secara berkelanjutan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Satyadharma, 2024; Syukriyanto, 2021). Keberhasilan upaya pembangunan tersebut sangat bergantung pada tersedianya infrastruktur yang memadai. Infrastruktur memiliki peran penting dalam menunjang peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat (Sjachrawy, 2024).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 menetapkan sejumlah sasaran dalam bidang pembangunan infrastruktur. Di antara tujuan tersebut adalah menjamin akses layanan air minum bagi seluruh penduduk, menghapus kawasan permukiman kumuh di wilayah perkotaan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak, termasuk pengelolaan air limbah, sampah, dan sistem drainase lingkungan hingga mencapai cakupan 100% pada tingkat kebutuhan dasar. Sasaran ini sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam memastikan ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan.

Ketersediaan air bersih yang mencukupi memiliki peran penting tidak hanya dalam menjaga kesehatan masyarakat, tetapi juga dalam mendorong peningkatan kualitas hidup serta kemajuan sosial dan ekonomi suatu wilayah (Sholahuddin & Rodhi, 2024). Keberadaan sistem penyediaan air minum yang efisien merupakan salah satu indikator utama tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang kerap mengalami kesulitan dalam memperoleh akses terhadap air bersih yang layak (Alfian, 2023; Zulkifli et al., 2024).

Pengelolaan sumber daya air sendiri bukan tidak mengalami banyak kendala dan tantangan sebagaimana yang dikemukakan oleh Sari et al. (2024) bahwa pengelolaan sumber daya air kini dihadapkan pada beragam tantangan yang semakin rumit, seiring dengan bertambahnya tekanan akibat pertumbuhan penduduk dan dampak dari perubahan iklim.

Kabupaten Kolaka Utara, yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, telah berupaya mewujudkan target penyediaan air bersih melalui pelaksanaan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis masyarakat. Pembangunan infrastruktur SPAM tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun pengelolaan SPAM di wilayah ini dilakukan oleh PDAM Kabupaten Kolaka Utara serta Lembaga Pengelola Non-BUMD SPAM, yang operasionalnya terbatas pada beberapa desa dan dijalankan secara swadaya oleh masyarakat setempat.

Dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat, maka akan meningkatkan pula kebutuhan akan jumlah air minum dan air bersih yang harus disiapkan bagi penduduk Kabupaten Kolaka Utara. Tabel 1 berikut akan memperlihatkan data jumlah penduduk dari Tahun 2020-2024.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Kolaka Utara

No	Tahun	Jumlah (jiwa)
1	2020	137,659
2	2021	139,234
3	2022	141,151
4	2023	140,488
5	2024	143,604

Sumber : BPS Kolaka Utara (2025)

Pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan untuk memperluas akses masyarakat terhadap air bersih, salah satunya melalui pelaksanaan program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis masyarakat (Huwaida & Miradhia, 2024). Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sistem air minum secara mandiri, dengan dukungan teknis serta regulasi dari pemerintah daerah (Tamim & Tumpu, 2022). Namun demikian, pelaksanaan program ini di lapangan masih menemui sejumlah tantangan, seperti lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, keterbatasan sumber pendanaan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sistem yang telah dibangun (Rifki & Jamaludin, 2024; Yati et al., 2021).

Hal itu sejalan dengan observasi yang ditemukan oleh peneliti dimana salah satu tantangan dalam optimalisasi pengelolaan SPAM di Kabupaten Kolaka Utara adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat baik dalam merawat dan menjaga jaringan pipa di seluruh wilayah Kabupaten Kolaka Utara maupun masih ditemukan rendahnya partisipasi masyarakat dalam iuran pengelolaan dan perawatan jaringan maupun dalam perilaku yang masih abai dalam menjaga kualitas sumber baku untuk SPAM di Kabupaten Kolaka Utara.

Salah satu upaya yang mungkin dapat diintegrasikan adalah dengan melancarkan komunikasi pembangunan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan jaringan dan layanan SPAM di Kabupaten Kolaka Utara. Hal itu ditegaskan dalam beberapa penelitian (Azzahra et al., 2025; Tanzil et al., 2023) yang menyatakan komunikasi pembangunan dapat menjadi solusi dalam mengatasi beberapa permasalahan termasuk masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam dukungan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air minum diyakini merupakan elemen penting dalam menjamin keberlangsungan layanan penyediaan air bersih, khususnya ketika sistem pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat secara langsung (Swastomo & Iskandar, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis bagaimana penerapan komunikasi pembangunan dalam mengatasi rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan jaringan dan layanan SPAM di Kabupaten Kolaka Utara. Fokus utama penelitian ini adalah pada upaya komunikasi pembangunan yang sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam melakukan pendekatan komunikasi untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam dukungan pengelolaan jaringan SPAM.

KAJIAN PUSTAKA

KEBIJAKAN PENYEDIAAN AIR MINUM

Basri & Subri (2006) menyatakan bahwa pembangunan adalah proses transformasi sosial yang dirancang secara terstruktur dan bertahap ke arah yang lebih baik, dengan menitikberatkan pada aspek modernisasi serta peningkatan kondisi sosial dan ekonomi. Tujuan utama pembangunan saat ini tidak lagi semata-mata berfokus pada pencapaian pertumbuhan Produk Nasional Bruto (GNP) yang tinggi, melainkan lebih diarahkan pada upaya mengurangi dan menghapus kemiskinan, mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan, serta menciptakan lapangan pekerjaan dalam kerangka ekonomi yang terus berkembang. Menurut Todaro (2009), terdapat tiga tujuan pokok dalam pembangunan, yaitu: (1) meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, layanan kesehatan, dan perlindungan keamanan; (2) menaikkan taraf hidup, yang tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup penyediaan lapangan kerja, peningkatan mutu pendidikan, dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya serta kemanusiaan; dan (3) memperluas pilihan ekonomi dan sosial bagi individu maupun bangsa, sehingga mereka dapat terbebas dari ketergantungan dan keterbatasan.

Keberhasilan pembangunan di berbagai negara selama ini cenderung dinilai berdasarkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, tanpa banyak memperhatikan konsekuensi terhadap lingkungan. Akibat dari pendekatan ini adalah munculnya kerusakan lingkungan yang akhirnya menjadi tanggungan masyarakat, baik secara langsung melalui penurunan kualitas hidup, maupun secara tidak langsung melalui kerugian ekonomi akibat tercemarnya tanah dan air. Oleh karena itu, penting bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menyadari potensi dampak lingkungan dari setiap kegiatan yang dilakukan. Kesadaran ini perlu diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aktivitas ekonomi maupun interaksi sosial.



Gambar 1. Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan dan Internalisasi Aspek Lingkungan Ke Dalam Pilar Sosial dan Ekonomi

Sumber : Alisjahbana & Murniningtyas (2018)

Komitmen terhadap Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) merupakan penguatan terhadap tujuan pembangunan milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*), yang juga dikenal sebagai MDG Plus, serta didasarkan pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Agenda 21, yang menekankan pentingnya visi dan konsep pembangunan yang berkelanjutan (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018).

KEBIJAKAN PENYEDIAAN AIR MINUM

Penyediaan air minum merupakan elemen krusial dalam pembangunan infrastruktur publik yang memberikan pengaruh besar terhadap kondisi kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial, serta peningkatan ekonomi (Gazali, 2017). Di Indonesia, regulasi mengenai penyediaan air minum tertuang dalam berbagai perangkat hukum, baik di level nasional maupun daerah. Salah satu landasan hukum utama dalam pengelolaan sumber daya air, termasuk aspek penyediaan air minum, adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Kusumaputra, 2021).

Selain kebijakan yang diterapkan di tingkat nasional, regulasi mengenai penyediaan air minum juga diatur oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah (Perda). Perda ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi geografis, sumber daya air, serta kebutuhan masyarakat setempat. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas perencanaan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum, yang dilaksanakan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Amelia, 2023). PDAM berperan penting dalam memastikan distribusi air bersih kepada masyarakat dengan cara yang efektif dan efisien, sembari tetap memperhatikan aspek ekonomi dan keberlanjutan lingkungan (Kurniati, 2025).

KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

Komunikasi pembangunan merupakan salah satu paradigma dalam ranah ilmu sosial. Dalam pelaksanaannya, komunikasi pembangunan mengandalkan proses interaksi sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan.

Effendy (2006) mendefinisikan komunikasi pembangunan sebagai proses penyampaian informasi dari individu atau kelompok kepada masyarakat luas. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengubah sikap dan pandangan mereka demi meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental.

Peran utama komunikasi pembangunan adalah memberikan edukasi dan dorongan kepada masyarakat, bukan menyampaikan laporan yang tidak sesuai kenyataan atau sekadar mencari pengakuan. Tujuan dari komunikasi pembangunan adalah menanamkan ide-ide, membentuk pola pikir yang positif, serta mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan oleh negara-negara yang sedang berkembang.

Komunikasi pembangunan dapat mencapai hasil yang diharapkan apabila dilaksanakan melalui perencanaan yang matang. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memahami informasi yang disampaikan, menerima pesan tersebut, serta turut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan (Suryani, 2021).

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan seharusnya bukan hasil dari mobilisasi semata, melainkan wujud partisipasi yang didasarkan pada kesadaran dan

kecerdasan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang berperan aktif dalam proses tersebut (Soetomo, 2013). Pentingnya komunikasi pembangunan dalam konteks pembangunan desa memiliki sejumlah peran strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di beberapa desa penerima manfaat program SPAM di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Penelitian telah dilakukan dari Bulan April-Mei 2025.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pejabat dan pelaksana pada Dinas PUPR Kabupaten Kolaka Utara dan pihak PDAM Kabupaten Kolaka Utara serta observasi lapangan dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun informan penelitian akan diuraikan pada Tabel 2 berikut

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan / Instansi
1	Nur Faisal, S.T.	Kabud Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Kolaka Utara
2	Bustang	Penata Kelola Operasional Kebijakan Air Minum dan Sanitasi Dinas PUPR Kabupaten Kolaka Utara
3	Muh. Rahmat, ST	Penata Kelola Operasional Subbag. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Kolaka Utara
4	Hasriadi	Staf Bagian Teknis PDAM Kabupaten Kolaka Utara
5	Ariel Jodding	Bumdes Desa Ponggiha

Sumber : Data Primer (2025)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran SPAM di Kab. Kolaka Utara

Temuan penelitian dari hasil wawancara pada para informan penelitian menemukan bahwa Pengelolaan Air Minum (SPAM) di Kab. Kolaka Utara dikoordinasi oleh Perumda Air Minum Tirta Tampanama sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam upayanya meningkatkan pelayanan air bersih pada masyarakat saat ini sangat menggantungkan sarana air.

Selain itu Kelompok Masyarakat (BUMDES) membantu dalam pengelolaan SPAM di wilayah perdesaan.

Dalam perkembangannya jaringan penyediaan air PDAM di Kabupaten Kolaka Utara (Perumda Air Minum Tirta Tampanama) mengalami perkembangan, baik jumlah pelanggan, kapasitas produksi, maupun jaringan distribusi dan transmisinya.

Khusus untuk jaringan SPAM yang dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Tampanama memiliki 11 sumber air baku yang tersebar di 11 IKK dengan kondisi 1 IKK yaitu IKK Batu Putih tidak dapat memberikan pelayanan karena masih dalam proses perbaikan. Data terkait Air Baku yang dimiliki oleh Perumda Air Minum Tirta Tampanama dijelaskan dalam tabel 3 berikut

Tabel 3. Penggunaan Air Baku Perumda Air Minum Tirta Tampanama

No	Cabang/Unit	Sistem Pengairan	Jenis Sumber Air Baku
1	IKK Pusat Lasusa	Gravitasi	Sungai Indewe dan Mata Air Balosi
2	IKK Ranteangin	Gravitasi	S. Batu Toru, MA Torotuo, MA. Raoda
3	IKK Kodeoha	Gravitasi	S. Malamala
4	IKK Tiwu	Gravitasi	S. Lapoku
5	IKK Ngapa	Gravitasi	MA. Purau
6	IKK Pakue	Gravitasi	MA. Purau
7	IKK Pakue Utara	Gravitasi	MA. Lengkong Batu, S Masolo, MA. Batu Putih
8	IKK Porehu	Gravitasi	Sungai Bangsala
9	IKK Tolala	Gravitasi	Sungai Leleulu
10	IKK Pakue Tengah	Gravitasi	Sungai Masolo
11	IKK Batu Putih	Pompa + gravitasi	Sungai Batu Putih

Sumber : Perumda Air Minum Tirta Tampanama, 2024

Sistem distribusi air dari reservoir yang diterapkan oleh perusahaan hingga tahun 2023 masih menggunakan sistem gravitasi pada 15 unit reservoir. Seluruh reservoir tersebut tersebar di 10 titik lokasi unit SPAM IKK, dengan total kapasitas mencapai 2.830 m³ sebagaimana dijelaskan dalam tabel 4 berikut.

Tabel 4. Jumlah dan Kapasitas Reservoir SPAM IKK

No	Cabang/Unit	Jumlah Reservoir	Kapasitas Reservoir (m ³)
1	IKK Pusat Lasusa	3	680
2	IKK Ranteangin	3	500
3	IKK Kodeoha	1	250
4	IKK Tiwu	1	150
5	IKK Ngapa	2	300
6	IKK Pakue	1	250
7	IKK Pakue Utara	1	200
8	IKK Porehu	1	150
9	IKK Tolala	1	150
10	IKK Pakue Tengah	1	200
Jumlah			2830

Sumber : Perumda Air Minum Tirta Tampanama, 2024

Adapun pelayanan yang dimiliki oleh Perumda Air Minum Tirta Tampanama hingga 31 Desember 2023, perusahaan tercatat memiliki 15.018 pelanggan, yang terdiri dari 12.126 pelanggan aktif dan 2.892 pelanggan non-aktif. Dibandingkan dengan jumlah pelanggan pada 31 Desember 2022 yang sebanyak 14.775, terdiri dari 12.097 pelanggan aktif dan 2.678 pelanggan non-aktif, perusahaan mengalami peningkatan pelanggan sebanyak 243 pelanggan atau 1,64%. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tahun 2023, dari total jumlah penduduk sebanyak 140.488 jiwa, sebanyak 41.810 jiwa atau 29,76% penduduk di Kabupaten Kolaka Utara telah terlayani. Sementara itu, di wilayah pelayanan perusahaan yang mencakup 117.415 jiwa, sebanyak 41.686 jiwa atau 35,50% telah mendapatkan layanan.

Komunikasi yang digunakan dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan SPAM

Temuan penelitian dari hasil wawancara pada para informan penelitian menemukan bahwa penerapan komunikasi yang dipakai adalah komunikasi dua arah dalam pengelolaan jaringan SPAM di wilayah pedesaan dan perkotaan Kabupaten Kolaka Utara berperan penting dalam memperkuat keterlibatan masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari jaringan SPAM yang dibangun serta dirawat, tetapi juga terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program.

Komunikasi yang terbuka mendorong terjadinya dialog antara pemerintah Kabupaten Kolaka Utara khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kolaka Utara beserta PDAM serta Kelompok masyarakat pengelola jaringan SPAM dan warga penerima manfaat layanan SPAM di seluruh wilayah Kabupaten Kolaka Utara, sehingga kebutuhan dan aspirasi masyarakat penerima manfaat layanan SPAM dapat tersalurkan secara efektif.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat meningkatkan rasa kepemilikan terhadap program SPAM, yang berdampak positif terhadap keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan infrastruktur air minum di daerah tersebut. Hal ini juga karena hasil observasi awal menemukan masih banyak masyarakat penerima manfaat layanan jaringan SPAM masih pada abai, cuek dan cenderung tidak memperdulikan dalam

pengelolaan jaringan SPAM, sekarang perlahan-lahan memahami dalam konteks pengelolaan SPAM sudah harus lebih peduli dan peduli.

Temuan penelitian dari hasil wawancara para informan penelitian menemukan Dinas PUPR Kabupaten Kolaka Utara sebagai *leading sector* pembangunan dan pemeliharaan jaringan SPAM menyadari begitu pentingnya menerapkan komunikasi partisipatif kepada masyarakat, terutama karena masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, karena berbagai hal :

- a. Kebutuhan air minum adalah kebutuhan semua manusia dan vital dalam kehidupan sehari-hari

Temuan penelitian menemukan semua informan penelitian sepakat bahwa air minum merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Setiap individu, tanpa memandang usia, status sosial, atau tempat tinggal, membutuhkan akses terhadap air bersih dan layak konsumsi untuk mendukung fungsi tubuh, menjaga kesehatan, serta menjalankan aktivitas sehari-hari. Ketiadaan air minum yang aman dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit yang ditularkan melalui air, kekurangan gizi, hingga menurunnya produktivitas. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan air minum tidak hanya merupakan tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi bagian penting dari tugas pemerintah dan lembaga terkait dalam memastikan hak dasar masyarakat terpenuhi.

Dalam konteks Kabupaten Kolaka Utara dengan topografi yang berbukit-bukit, akses terhadap air bersih sering kali masih menjadi tantangan besar, sehingga intervensi melalui program penyediaan air minum (SPAM) menjadi sangat penting. Penyediaan air yang memadai akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat.

Keuntungan yang dimiliki bahwa jaringan infrastruktur SPAM di wilayah Kabupaten Kolaka Utara cenderung sudah baik dan hampir menjangkau seluruh desa dan kecamatan di wilayah Kabupaten Kolaka Utara. Cakupan infrastruktur yang luas ini menjadi modal awal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan produktivitas masyarakat. Keberadaan jaringan ini juga mempermudah pelaksanaan program-program pembangunan yang berbasis kebutuhan dasar, serta meminimalkan biaya dan waktu distribusi air. Dengan infrastruktur yang relatif baik, Pemerintah Daerah tinggal fokus pada aspek peningkatan kapasitas pengelolaan, partisipasi masyarakat, serta perawatan jaringan agar layanan tetap optimal dan berkelanjutan.

- b. Pengelolaan dan pemeliharaan jaringan SPAM membutuhkan keterlibatan segala pihak termasuk masyarakat

Pengelolaan dan pemeliharaan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sebagai pengguna langsung layanan tersebut. Keterlibatan masyarakat penting agar tercipta rasa memiliki terhadap infrastruktur yang dibangun, sehingga mereka terdorong untuk ikut menjaga keberlanjutan sistem yang telah tersedia. Di sisi lain, pemerintah dan lembaga teknis memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendampingan, pelatihan, serta dukungan regulasi dan teknis guna memastikan sistem berjalan dengan baik. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pengelola seperti PDAM atau lembaga non-

BUMD, dan masyarakat akan menciptakan sinergi dalam pemeliharaan, perbaikan, serta pengawasan jaringan SPAM. Keterlibatan warga juga berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, program SPAM berisiko mengalami penurunan fungsi atau bahkan gagal dalam jangka panjang, terutama di wilayah dengan sumber daya terbatas.

Temuan penelitian ini memvalidasi pernyataan FAO (Asngari, 2001) bahwa penggalangan partisipasi dilandasi adanya pengertian bersama, dan adanya pengertian tersebut adalah karena di antara orang-orang tersebut saling berkomunikasi dan berinteraksi sesamanya.

Temuan penelitian terkait pentingnya dilakukan komunikasi dalam pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan dan pengelolaan SPAM memvalidasi temuan penelitian Zahara (2018) yang meyakini bahwa peranan komunikasi dalam pembangunan terkait dengan arah perubahan yang berarti kegiatan komunikasi harus mampu mengantisipasi gerak pembangunan. Selain itu komunikasi yang efektif diyakini akan mampu merangsang keterlibatan dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama pemerintah dalam mendukung proses pembangunan yang sementara dilaksanakan.

Temuan penelitian ini juga menguatkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rani (2016) bahwa tujuan utama dari komunikasi pembangunan bukan hanya untuk mengenalkan pembangunan dan menyampaikan pesan-pesan terkait, melainkan yang lebih penting adalah untuk mendorong, mengaktifkan, dan mempertahankan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hado et al. (2025) yang meyakini bahwa dalam mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Konawe Kepulauan, sangat membutuhkan komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Temuan penelitian ini juga menguatkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Mahdar et al., 2024) bahwa komunikasi yang dilakukan dengan baik oleh petugas mampu mendukung keberhasilan tugas yang dibebankan kepadanya.

KESIMPULAN

Komunikasi pembangunan menjadi jembatan penting antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program SPAM terutama dalam mengatasi masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Informasi yang disampaikan secara tepat sasaran, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan sesuai konteks lokal masyarakat Kabupaten Kolaka Utara, akan membantu masyarakat memahami tujuan serta manfaat program. Keterbukaan dalam dialog mendorong terciptanya kepercayaan, yang merupakan fondasi partisipasi aktif. Ketika warga merasa dilibatkan dan didengar, mereka cenderung berkontribusi lebih besar, baik dalam bentuk tenaga, ide, maupun pemeliharaan infrastruktur. Selain itu, komunikasi yang bersifat dua arah memungkinkan adanya umpan balik, sehingga permasalahan yang muncul di lapangan dapat segera diatasi. Hal ini menjadikan program SPAM lebih adaptif dan berkelanjutan.

Rekomendasi penelitian ini adalah mendorong Pihak Pemkab dalam hal ini Dinas PUPR Kab. Kolaka Utara ketika menerapkan pendekatan komunikasi dalam program pembangunan dan pengelolaan jaringan SPAM harus disesuaikan dengan karakteristik lokal, baik dari segi

budaya, bahasa, maupun pola interaksi sosial masyarakat setempat. Pendekatan yang bersifat inklusif sangat penting agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan minoritas, dapat terlibat aktif. Strategi ini juga harus mencakup media komunikasi yang relevan baik melalui forum warga, media lokal, hingga komunikasi interpersonal. Ketika komunikasi bersifat partisipatif dan merangkul semua pihak, maka program pembangunan lebih mungkin dirasakan manfaatnya secara merata dan berkelanjutan oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Kolaka Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, A. R. (2023). *Krisis Air di Indonesia: Fenomena, Dampak & Solusi*. Suluah Kato Khatulistiwa.
- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target, dan Strategi Implementasi*. Unpad Press.
- Amelia, E. B. (2023). Faktor-Faktor Kritis Penentu Kesuksesan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sektor Air Minum. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, 19(1), 57–72.
- Asngari, P. S. (2001). *Peranan Agen Pembaruan/Penyuluh dalam Usaha Memberdayakan (Empowerment) Sumber Daya Manusia Pengelola Agribisnis (Orasi Ilmiah) BT - Orasi Ilmiah Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor*. Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor.
- Azzahra, T. B., Farenta, N. U. M., Nurussyadhah, I., Arintha, C. D., Wahyuningtyas, S., Damita, A., & Watie, E. D. S. (2025). Edukasi Pembuatan Konten di Media Sosial Platform Tiktok untuk Siswa Kelas 10 SMA N 9 Semarang. *Jurnal Abdikaryasakti*, 5(1), 1–24.
- Basri, Y. Z., & Subri, M. (2006). *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. PT. Raja Grafindo.
- Effendy, O. U. (2006). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Gazali, M. (2017). Regulasi dan Strategi dalam Penyediaan Infrastruktur Air Minum dengan Skema Public Private Partnership (PPP) di Kabupaten Indragiri Hilir. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 3(1).
- Hado, Sjachrawy, L. O. M. I., Taziruddin, Mahdar, & Kasim, S. S. (2025). Peran Komunikasi Pembangunan dalam Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Konawe Kepulauan. *YASIN: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Budaya*, 5(1), 510–525.
- Huwaida, S. A., & Miradhia, D. (2024). Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Mekarwangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 8(1), 1–13.
- Kurniati, A. I. (2025). Legal Protection For Consumers Regarding Regional Drinking Water Company (PDAM) Services In Samarinda City: Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Layanan Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) di Kota Samarinda. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 15(1), 138–151.
- Kusumaputra, A. (2021). Dekonstruksi Pembangunan Berkelanjutan Melalui Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Omnibus Law. *LITRA: Jurnal*

- Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1(1), 45–58.
- Mahdar, Satyadharma, M., Susanti, N., & Karamani, D. D. (2024). Komunikasi Petugas dalam Peningkatan Layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara). *JMDR Jurnal Digital Media & Relationship*, 6(1), 1–8.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019.
- Rani, S. (2016). Strategi Komunikasi dalam Pembangunan Desa Berbasis Partisipatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 15(29).
- Rifki, A., & Jamaludin. (2024). Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Juai Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 7(2), 1498–1514. <https://doi.org/10.35722/japb.v7i2.1096>
- Sari, G. F. A., Yolanda, D., & Rajib, R. K. (2024). Krisis Air Menangani Penyediaan Air Bersih di Dunia yang Semakin Kekurangan Sumber Daya. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(5), 334–341.
- Satyadharma, M. (2024). *Strategi Penyelenggaraan Transportasi Darat Berbasis Internet of Things (IoT) untuk mendukung Transportasi Berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tenggara*. Universitas Halu Oleo.
- Sholahuddin, M., & Rodhi, N. N. (2024). Edukasi Masyarakat Peduli Air Bersih dalam Upaya Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Air Bersih. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 8(3), 416–424.
- Sjachrawy, L. O. M. (2024). *Analisis Pelaksanaan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di Kecamatan Wawonii Timur Laut Kabupaten Konawe Kepulauan*. Program Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo.
- Soetomo. (2013). *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Suryani. (2021). *Komunikasi Pembangunan dalam Media Cetak Lokal Studi Isi Pemberitaan Pemkab. Bangka*. Media Sains Indonesia.
- Swastomo, A. S., & Iskandar, D. A. (2020). Keberlanjutan Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat Desa Piji dan Desa Gintungan di Kabupaten Purworejo. *Jurnal Planoeath*, 5(1), 7–13.
- Syukriyanto. (2021). *Pengelolaan Simpul Transportasi Laut di Kabupaten Wakatobi*. Universitas Halu Oleo.
- Tamim, T., & Tumpu, M. (2022). *Sistem Penyediaan Air Minum*. Tohar Media.
- Tanzil, T., Juhaepa, J., Peribadi, P., Anggraini, D., & Kasim, S. S. (2023). Pelatihan Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Andomesinggo Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe. *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 50–52. <https://doi.org/10.47540/ijcs.v2i1.927>
- Todaro, M. (2009). *Pembangunan Ekonomi: Edisi Kesebelas Jilid 1*. Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.
- Yati, I., Trilestari, E. W., Sufianti, E., Mochtar, S., Gedeona, H. T., & Sugiharti, D. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Purwakarta (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cibatuh). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(2), 83–96.

- Zahara, E. (2018). Peranan Komunikasi dalam Pembangunan Masyarakat Pedesaan. *Warta Dharmawangsa*, 55.
- Zulkifli, Z. F., Hendriyulianti, D. A., Rahma, F., Ayu, R. M., Wicaksana, B. P., Pratama, D. A., & Angelita, H. B. (2024). Sanitasi Untuk Semua dalam Pendampingan Pengelolaan Sanitasi dan Penyediaan Air Bersih Untuk Masyarakat Desa Tebing Tinggi. *Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 117–124.